p-ISSN 2622-3082
e-ISSN 2622-3090

Menguji Efektivitas Pengendalian Intern dalam Memperkuat Hubungan antara Pemahaman Basis Akrual dan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada BKAD Kabupaten Majene)

Nurwahyuni Syahrir[1], Taufik Hidayat B Tahawa [2] , Erwin [3]
[123]Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat, Majene

Nurwahyunisyahrir@unsulbar.ac.id*
taufikhidayat@unsulbar.ac.id
Erwin@unsulbar.ac.id

ABSTRACT

This study aims to test and validate the effect of accrual accounting knowledge on the quality of financial statements and the internal control system can moderate the relationship between accrual accounting knowledge and the quality of financial statements. This study is a quantitative study with primary data with the analysis technique used is moderated regression analysis with WarpPLS 8.0 software. This study uses Employees at BKAD Majene Regency as the population and the sample in this study is 94 respondents obtained using census sampling techniques. The test results show that Understanding the Accrual Basis has an effect on the Quality of Financial Statements with a p value <0.001 and the Internal Control System moderates the relationship between Understanding the Accrual Basis and the Quality of Financial Statements with a coefficient of -0.593 and p value <0.001.
Keywords: Internal Control System; Understanding the Accrual Basis; Financial Report Quality

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memvalidasi pengaruh pengetahuan akuntansi akrual terhadap kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan akuntansi akrual dengan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data primer dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi moderasi dengan software WarpPLS 8.0. Penelitian ini menggunakan Pegawai di BKAD Kabupaten Majene sebagai populasi dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 94 responden yang diperoleh dengan menggunakan teknik sensus sampling. Hasil uji menunjukkan bahwa Pemahaman Basis Akrual berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan *p value* <0.001 dan Sistem Pengendalian Intern memoderasi hubungan Pemahaman Basis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan koefisien -0.593 dan p value <0.001.
Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern; Pemahaman Basis Akrual; Kualitas Laporan Keuangan

Jurnal Akun Nabelo:
Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif
Volume 7/Nomor 1/Juli 2024
doi:10.11594/untad.jan.7.1.24712
Jurusan Akuntansi FEB Universitas Tadulako

A. PENDAHULUAN

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sangat penting dalam mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pelaporan keuangan yang akuntabel memainkan peran signifikan dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih efektif. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efisien dan tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat.

Transisi menuju akuntansi akrual pada sektor publik diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar ini mengharuskan pemerintah daerah untuk menyiapkan laporan keuangan berdasarkan akrual. Penerapan basis akrual tidak hanya melibatkan pencatatan transaksi yang lebih rumit, tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai konsep akuntansi, seperti aset, liabilitas, dan ekuitas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Pristiani & Mahmud, 2016), pemahaman terhadap basis akrual sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Peneltian diatas mengungkapkan, "Penerapan basis akrual tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi keuangan pemerintah daerah". Penelitian ini menegaskan pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai pemerintah daerah dalam memahami konsep akuntansi berbasis akrual.

Pemahaman yang memadai tentang basis akrual sangat penting untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas di pemerintahan daerah. Basis akrual memungkinkan pencatatan transaksi keuangan terjadi pada saat transaksi tersebut terjadi, bukan hanya ketika kas diterima atau dikeluarkan (Trihani, 2018). Dengan demikian, laporan keuangan akan lebih akurat dalam mencerminkan keadaan keuangan daerah, sehingga informasi yang disajikan akan lebih bermanfaat bagi para pengambil keputusan.

Selain pemahaman yang baik mengenai akuntansi akrual, faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal yang efektif. Sistem pengendalian internal terdiri dari serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas dan pelaporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang kuat dapat mengurangi risiko kesalahan atau penipuan dalam proses pelaporan keuangan dan memastikan bahwa setiap transaksi yang dicatat adalah valid, mematuhi aturan, dan diverifikasi dengan benar.

Di lingkungan pemerintahan daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) n. 60 Tahun 2008. Tujuan utama SPIP adalah memperkuat tanggung jawab dan transparansi pengelolaan keuangan negara melalui penerapan prosedur. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik menjadi lebih penting mengingat kompleksitas transaksi keuangan yang dilakukan (Sari, 2013). Sistem ini harus mampu mengidentifikasi, mengelola dan memantau risiko -risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan keuangan daerah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan andal.

Keberhasilan penerapan akuntansi akrual sangat bergantung pada adanya sistem pengendalian internal yang kuat. Fungsi sistem pengendalian intern adalah memantau dan mengendalikan proses pencatatan transaksi keuangan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku. Jika sistem pengendalian internal tidak berfungsi dengan baik, maka risiko kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan semakin besar.

Menurut penelitian (Martini et al., 2019)), "Sistem pengendalian intern yang efektif sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, terutama dalam konteks penerapan basis akrual di pemerintahan daerah". Penelitian tersebut menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat pengendalian internal melalui pengawasan yang lebih ketat dan audit rutin untuk memastikan bahwa setiap transaksi dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Penelitian ini berfokus pada peran sistem pengendalian internal sebagai faktor moderasi yang memperkuat hubungan antara pengetahuan akuntansi akrual dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara teori, sistem pengendalian internal yang kuat akan membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan memastikan setiap transaksi dicatat dengan benar dan sesuai standar yang berlaku..

Jika pengetahuan tentang akuntansi akrual tidak didukung oleh sistem pengendalian internal yang baik, maka kesalahan dalam pencatatan transaksi dan laporan keuangan dapat terjadi kembali. Dalam hal ini, sistem pengendalian intern bertindak sebagai pelindung dari kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga kualitas laporan keuangan dapat tetap terjaga meskipun pemahaman tentang basis akrual belum sepenuhnya optimal di kalangan pegawai pemerintah.

Kabupaten Majene dipilih sebagai objek penelitian karena, seperti daerah lain di Indonesia, daerah ini masih dalam proses transisi menuju penerapan basis akrual yang lebih baik. Kabupaten Majene terus berupaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman pegawai tentang konsep basis akrual dan kurangnya penerapan sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran sistem pengendalian internal dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan akuntansi akrual dengan kualitas pelaporan keuangan di BKAD Kabupaten Majene.

TINJAUAN PUSTAKA

B.1. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu proses terpadu dalam tindakan dan kegiatan pada seluruh tingkat pemerintahan, yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang cukup terhadap tercapainya tujuan organisasi pemerintahan melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan tuntas. dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hindriani et al., 2012). SPIP diatur dengan Peraturan Pemerintah n. 60 Tahun 2008, yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen sektor publik dan standar pengendalian internal internasional yang ditetapkan oleh COSO (*Committee of Sponsoring Organizations)* (Pitaloka et al., 2020) (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Berdasarkan peraturan pemerintah no. 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur penting yaitu pengendalian lingkungan, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan pengendalian.

B.2. Pemahaman Berbasis Akrual

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan sistem akuntansi sektor publik yang mengakui pendapatan dan biaya pada saat transaksi terjadi, tanpa memperhatikan kapan uang diterima atau

dibayarkan(Hartati et al., 2020). Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan pemerintah agar lebih transparan, akurat, dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi keuangan dan operasional pemerintah(Zelmiyanti, 2015).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dengan Peraturan Pemerintah n. 71 Tahun 2010 yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Standar ini disajikan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. SAP berbasis akrual ini bertujuan untuk memberikan pelaporan keuangan yang lebih komprehensif sesuai dengan standar internasional, termasuk Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS). PSAP yang diterapkan hingga saat ini adalah:. (R. Indonesia, 2010)

PASP 01 Penyajian Laporan Keuangan
PASP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
PASP 03 Laporan Arus Kas
PASP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
PASP 05 Akuntansi Persediaan
PASP 06 Akuntansi Investasi
PASP 07 Akuntansi Aset Tetap
PASP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
PASP 09 Akuntansi Kewajiban
PASP 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak Dilanjutkan Pernyataan No 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
PASP 12 Laporan Operasional
PASP 13 Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
PASP 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud
PASP 15 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
PASP 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi
PASP 17 Properti Investasi

B.3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah mengacu pada sejauh mana laporan tersebut mampu menggambarkan situasi keuangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah secara akurat, andal, dan relevan bagi pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi beberapa kriteria, seperti relevansi, keandalan, komparabilitas, dan kemudahan pemahaman oleh pengguna (Ulupui et al., 2021). Dalam konteks pemerintah daerah, kualitas laporan juga dinilai dari kepatuhan terhadap SAP dan sejauh mana laporan tersebut memberikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik (Presiden Republik Indonesia, 2010).

Di Indonesia, laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun sesuai dengan standar akuntansi berbasis akrual pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Penerapan standar akuntansi berbasis akrual ini bertujuan untuk memungkinkan pemerintah daerah agar menyajikannya secara lebih lengkap dan representatif. laporan mengenai situasi keuangan, perubahan keuangan, arus kas, serta pengelolaan aset dan liabilitas (Presiden Republik Indonesia, 2010) (Niu et al., 2014).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan eksplanatori. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen (Pemahaman basis akrual) terhadap variabel dependen (Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah), dengan variabel antara (Sistem pengendalian intern). Kajian ini akan dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene. Populasi yang dicakup dalam penelitian ini adalah pegawai BKAD Kabupaten Majene yang berjumlah 94 orang. Penelitian ini menggunakan teknik sampling sensus, dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survei kuesioner. Variabel independen (X): akuntansi akrual diukur dengan menggunakan indikator Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no 1 sampai dengan 17. Variabel dependen (Y): Kualitas pelaporan keuangan dengan menggunakan indikator: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami yang merupakan formulasi dari PP no. 71 Tahun 2010. Variabel moderasi (Z) : Sistem pengendalian internal menggunakan indikator-indikator yang terdapat pada PP nomor 60 tahun 2008. Analisis data akan dilakukan dengan parsial Least Square (PLS) dengan software WarpPLS 8.0. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah teknik analisis menggunakan software WarpPLS 8.0 dengan tiga pengujian yaitu analisis outer model, analisisinner model,dan uji hipotesis (Sholihin & Ratmono, 2021).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Inner Outer Model

D.1 Outer Model

Tabel 1
Hasil pengujianOuter Weight

Indikator	Outer loading	Type	P value	AVE	Composite reliability
x1.1	0.683	Reflect	<0.001	0.519	0.793
x1.2	0.678	Reflect	<0.001		
x1.3	0.637	Reflect	<0.001		
x1.4	0.671	Reflect	<0.001		
x1.5	0.709	Reflect	<0.001		
x1.6	0.627	Reflect	<0.001		
x1.7	0.639	Reflect	<0.001		
x1.8	0.621	Reflect	<0.001		
x1.9	0.668	Reflect	<0.001		
x1.10	0.629	Reflect	0.001		
x1.11	0.608	Reflect	<0.001		
x1.12	0.605	Reflect	0.019		
x1.13	0.759	Reflect	<0.001		
x1.14	0.763	Reflect	<0.001		
x1.15	0.723	Reflect	<0.001		

Indikator	Outer loading	Type	P value	AVE	Composite reliability
x1.16	0.725	Reflect	<0.001		
x1.17	0.626	Reflect	<0.001		
Z.1	0.779	Reflect	<0.001		
Z.2	0.859	Reflect	<0.001		
Z.3	0.892	Reflect	<0.001	0.622	0.891
Z.4	0.707	Reflect	<0.001		
Z.5	0.686	Reflect	<0.001		
Y.1	0.624	Reflect	<0.001		
Y.2	0.812	Reflect	<0.001		
Y.3	0.885	Reflect	<0.001		
Y.4	0.761	Reflect	<0.001		
Y.5	0.811	Reflect	<0.001		
Y.6	0.743	Reflect	<0.001		
Y.7	0.87	Reflect	<0.001	0.611	0.953
Y.8	0.718	Reflect	<0.001		
Y.9	0.839	Reflect	<0.001		
Y.10	0.706	Reflect	<0.001		
Y.11	0.833	Reflect	<0.001		
Y.12	0.745	Reflect	<0.001		
Y.13	0.771	Reflect	<0.001		

Sumber: Data diolah (2024)

Dari tabel diatas terlihat hasil yang menunjukkan bahwa masing-masing konstruk mempunyai nilai loading lebih besar dari 0,6 dan seluruh indikator mempunyai p-value kurang dari 0,05 sehingga memenuhi standar kriteria Outer loading. Berdasarkan hal di atas juga terlihat bahwa nilai AVE >0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk tersebut mempunyai validitas yang baik. Dan tabel diatas juga menunjukkan nilai reliabilitas komposit >0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk mempunyai reliabilitas yang baik (Sholihin & Ratmono, 2021).

D.2 Inner Model

Tabel 2
Output Pengujian Inner Model

Pengujian	Hasil	Kriteria	Kesimpulan
Average path coefficient (APC)	0.474, P<0.001	0.05	Memenuhi Kriteria
Average R-squared (ARS)	0.470, P<0.001	0.05	Memenuhi Kriteria
Average adjusted R-squared (AARS)	0.459, P<0.001	0.05	Memenuhi Kriteria
Average block VIF (AVIF)	1	< 5	Memenuhi Kriteria
Average full collinearity VIF (AFVIF)	1.819	< 5	Memenuhi Kriteria
Tenenhaus GoF (GoF)	0.537	Large	Memenuhi Kriteria
Simpson's paradox ratio (SPR)	1	ideally = 1	Memenuhi Kriteria
R-squared contribution ratio (RSCR)	1	ideally = 1	Memenuhi Kriteria
Statistical suppression ratio (SSR)	1	ideally = 0.7	Memenuhi Kriteria
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)	1	ideally = 0.7	Memenuhi Kriteria

Sumber: Data diolah (2024)

Hasil pengujian dengan WarpPLS 8.0 diperoleh hasil estimasi inner model. Nilai P Value APC, ARS, AARS masing-masing bernilai kurang dari 0,05 maka model memenuhi kriteria. Nilai AVIF adalah 1,000 dan AFVIF 1,819 masih di bawah 5 maka tidak terjadi multikolinearitas. Nilai Tenengaus Gof sebesar 0,537 berarti model penelitian dikatakan kuat . Nilai Q-square sebesar 0,474>0 dan model penelitian mempunyai nilai signifikansi prediktif. Nilai adjusted R square adalah 0,459. Hal ini berarti variabel dalam penelitian menjelaskan sebesar 45,9%. Sisanya sebanyak 54,1% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Dapat disimpulan bahwa model penelitian memenuhi kriteria evaluasi outer model dan inner model (Sholihin & Ratmono, 2021) (Yamin, 2021).

D.3 Uji Hipotesis

Hasil konstruksi model pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 yang menjelaskan hubungan antara Pemahaman Basis Akrual (X) terhadap Kualitas laporan keuangan (Y). penelitian ini juga menjelaskan Sistem Pengendalian Intern (Z) menjadi variabel antara/ memoderasi hubungan Pemahaman Basis Akrual (X) terhadap variabel Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Peneltian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Structural Equation Modelling dengan Metode Partial Least Square(PLS) dengan gambar sebagai berikut:

Gambar 1
Hasil Konstruksi Model

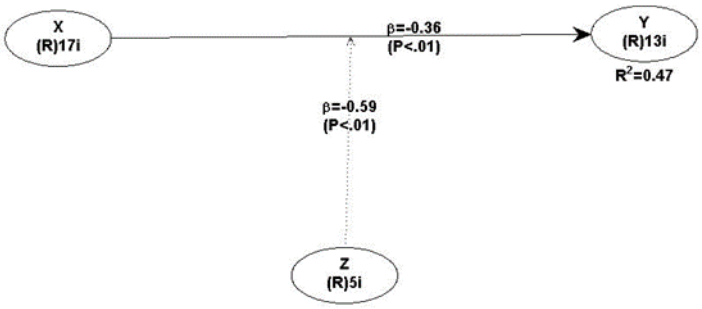

Sumber: Warppls 8.0 (2024)

Tabel 3
Uji Hipotesis

Hipotesis	Koefisien	P Value	Hasil	Kesimpulan
X – Y	-0.355	<0.001	Berpengaruh Negatif dan Signifikan	Hipotesis diterima
X - Y - Z (Moderating)	-0.593	<0.001	Berpengaruh Negatif dan Signifikan	Hipotesis diterima

Sumber: Data diolah (2024)

Dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan:

1. Hasil uji pengaruh Pemahaman Basis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan tabel 3, nilai koefisien sebesar 0.355 dan p value sebesar <0,01. Nilai p value sebesar <0,01 artinya H1diterima karena terdapat pengaruh antara variabel X terhadap Variabel Y dan hubungan tersebut juga telah berpengaruh signifikan.
2. Hasil uji pengaruh Sistem Pengendalian Intern memoderasi Pemahaman Basis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan tabel 3, nilai koefisien seesar 0.593 dan nilai p value sebesar <0,01. Hasil tersebut diterima karena Variabel Z dapat memoderasi pengaruh Variabel x terhadap variabel Y dan hubungan tersebut juga telah berpengaruh signifikan.

D.4 Pembahasan

Pemahaman Basis Akrual berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji hipotesis menunjukkan H1 diterima dan variabel Pemahaman Basis Akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Akuntansi akrual merupakan prinsip akuntansi yang mensyaratkan pengakuan pendapatan dan beban pada saat timbul, bukan pada saat uang diterima atau dibayarkan. Pemahaman menyeluruh mengenai akuntansi akrual sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat mencerminkan kinerja keuangan pemerintah secara akurat (Amrih, 2023).

Penerapan basis akrual yang tepat dapat membuat laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan basis kas. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap metode akrual sangat penting untuk meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Kalumata et al., 2016).

Menurut (A'la Alrahim & Wibowo, 2022), Kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada bagaimana prinsip akuntansi, termasuk akuntansi berbasis akrual, dipahami dan diterapkan oleh entitas dan staf akuntansi. Akuntansi akrual memungkinkan laporan keuangan menjadi lebih relevan karena pendapatan dan beban diakui pada saat transaksi berlangsung, yang mana hal ini sangat penting dalam evaluasi kinerja keuangan. Pemahaman menyeluruh mengenai akuntansi akrual sangat penting agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat menyajikan informasi yang relevan dan terpercaya (Febransyah & Astari, 2021).

Metode akuntansi akrual merupakan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan mencatat seluruh aset dan kewajiban secara komprehensif. Pemahaman yang baik mengenai akuntansi akrual memungkinkan pemerintah daerah menyiapkan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan (Evira, 2015).

Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pemahaman Basis Akrual berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan accrual basis dengan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang efektif sangat penting untuk memastikan penerapan akuntansi akrual yang benar dalam laporan keuangan. SPI yang kuat membantu mencegah dan mendeteksi kesalahan atau penyimpangan dalam pencatatan transaksi berbasis akrual. Dengan demikian, SPI yang baik dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan akuntansi akrual dengan kualitas pelaporan keuangan (Adhillah, 2022).

Menurut (Parinding et al., 2023) menekankan bahwa SPI memainkan peran kunci dalam mempertahankan kualitas pelaporan keuangan, terutama dalam lingkungan yang menerapkan basis akrual. Peneltian tersebut berargumen bahwa pemahaman yang mendalam tentang basis akrual oleh staf akuntansi perlu didukung oleh SPI yang kuat untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dicatat dengan benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan SPI yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa laporan keuangannya mencerminkan situasi keuangan sebenarnya (Nasirwan et al., 2024).

Sistem Pengendalian Intern yang efektif adalah fondasi bagi penerapan basis akrual yang baik. SPI berfungsi sebagai mekanisme untuk mengontrol dan mengevaluasi proses pencatatan akrual, sehingga meminimalkan risiko kesalahan pencatatan atau manipulasi data keuangan. Tanpa SPI yang memadai, pemahaman basis akrual oleh staf akuntansi tidak akan cukup untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi (DIANITA & Setiawan, 2023).

Kerangka COSO yang merupakan standar internasional untuk sistem pengendalian internal menyatakan bahwa pengendalian internal yang kuat memberikan keyakinan yang wajar bahwa laporan keuangan disusun secara akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi, termasuk akuntansi akrual. SPI membantu memastikan bahwa pemahaman basis akrual diterapkan secara konsisten dan efektif dalam proses pelaporan

keuangan, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan (Rusvianto et al., 2018).

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan metode akuntansi akrual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman menyeluruh mengenai akuntansi akrual sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan mampu mencerminkan kondisi keuangan saat ini, sehingga meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan. Selain itu, sistem pengendalian internal (ICS) telah terbukti memoderasi dampak pengetahuan akuntansi akrual terhadap kualitas pelaporan keuangan. SPI yang efektif dapat memperkuat hubungan tersebut dengan memastikan proses akuntansi akrual dijalankan dengan benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan manipulasi laporan keuangan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus dipertimbangkan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada beberapa pemerintah daerah, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya bisa digeneralisasikan ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia atau negara lain. Kedua, variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, karena faktor lain juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti pengaruh kebijakan pemerintah pusat, budaya organisasi atau informasi teknologi informasi. Disarankan agar penelitian selanjutnya lebih banyak melibatkan pemerintah daerah atau lembaga pemerintah lainnya agar mempunyai gambaran yang lebih lengkap mengenai dampak pemahaman akuntansi akrual dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A'la Alrahim, A., & Wibowo, P. (2022). Analisis manfaat laporan keuangan berbasis AKRUAL dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Kabupaten Bantaeng. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, *7*(3), 80–93.

Adhillah, M. N. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, *4*(2), 197–212.

Amrih, G. G. (2023). Perkembangan Keuangan Berstandar Akuntansi Akrual. *Journal of Economics and Business UBS*, *12*(2), 1323–1336.

DIANITA, F., & Setiawan, A. (2023). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Karanganyar)*. UIN RADEN MAS SAID.

Evira, A. (2015). Tinjauan Perbedaan Persepsi Antara Penyusun dan Pengguna Laporan Keuangan di Daerah dalam Rangka Perubahan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus pada Pemkab Grobogan). *Jurnal Paradigma Universitas Islam Batik Surakarta*, *13*(01), 115621.

Febransyah, F., & Astari, D. (2021). Analisis Tingkat Pemahaman

Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Pada Kantor Camat Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Jurnal Ratri)*, *2*(2).

Hartati, S., Hendri, E., & Lilianti, E. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, *2*(2), 167–185.

Hindriani, N., Hanafi, I., & Domai, T. (2012). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, *15*(3), 1–9.

Indonesia, Pemerintah Republik. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

Indonesia, Presiden Republik. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Jakarta (ID): Sekretariat Negara*.

Indonesia, R. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. *Peraturan Pemerintah*, *71*, 160–173.

Kalumata, M. C. T., Ilat, V., & Warongan, J. D. L. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Reviu Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Accountability*, *5*(2), 152–167.

Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, *2*(1).

Nasirwan, A. V. M., Siahaan, A., & Sitohang, A. A. (2024). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) PADA DINAS KESEHATAN DI KOTA MEDAN. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(7), 274–284.

Niu, F. A. L., Karamoy, H., & Tangkuman, S. (2014). Analisis Penerapan Pp. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *2*(4).

Parinding, S., Sari, N., & Ayu Dasila, R. (2023). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Kota Palopo. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dan Sistem Pengendalian Intren Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, *16*(1), 97–111.

Pitaloka, H., Widayanti, H., NS, A. S., & KABIB, N. U. R. (2020). PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DALAM PERSPEKTIF COSO"DI DESA KALIKURMO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN SEMARANG. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, *1*(08), 1–11.

Pristiani, P., & Mahmud, A. (2016). Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Berdasarkan Demografi Pegawai. *Accounting Analysis Journal*, *5*(1).

Rusvianto, D., Mulyani, S., & Yuliafitri, I. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Bandung). *Banque Syar'i: Jurnal Llmiah Perbankan Syariah*, *4*(1), 33–67.

Sari, D. (2013). *Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, implementasi standar akuntansi pemerintahan, penyelesaian temuan audit terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Penelitian pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten)*.

Sholihin, M., & Ratmono, D. (2021). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk hubungan nonlinier dalam penelitian sosial dan bisnis*. Penerbit Andi.

Trihani, I. (2018). Analisis Manfaat Basis Akrual dan Basis Kas Menuju Akrual Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, *6*(1).

Ulupui, I. G. K. A., Gurendrawati, E., & Murdayanti, Y. (2021). *Pelaporan Keuangan Dan Praktik Pengungkapan*. Goresan Pena.

Yamin, S. (2021). *TUTORIAL STATISTIK SPSS, LISREL, WARPPLS, & JASP (MUDAH & APLIKATIF)* (Vol. 1). Dewangga Energi Internasional Publishing.

Zelmiyanti, R. (2015). Perkembangan akuntansi berbasis akrual pada sektor pemerintah di indonesia. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, *6*(1), 68–72.